

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PROVINSI

SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

Oleh

ALWATI

NIM 105710199014



**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**ANALISIS DAMPAK TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP TRANSPORTASI
KONVENSIONAL DI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**ALWATI
NIM 105710199014**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk keluarga besar Saya terutama untuk kedua orang tua saya bapak Sapiing dan ibu Alo yang sangat mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan untuk masa depan saya, yang selalu menyelipkan nama saya disetiap doanya agar saya bisa berada dititik yang sekarang. Untuk paman saya Jufri dan saudara-saudaraku kakak Lisda, Elvi, dan Juwita Yanti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Serta semua rekan-rekan seangkatan yang telah membantu dan memberikan saran untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

MOTTO HIDUP

Keluhan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah
Tapi akan menambah masalah. Oleh karena itu tetaplah
Berusaha untuk menemukan solusi, karena tidak ada
Rumah yang tak punya pintu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan"
Nama Mahasiswa : Alwati
No Stambuk/NIM : 105710199014
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2018.

Makassar, 14 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Hj. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 551

Pembimbing II,

Faidhul Adziem, SE., M.Si.
NBM: 927515

Diketahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi & Bisnis
Dhismuh Makassar

Ismail Basutong, SE., MM.
NBM: 909078

Ketua,

Jurusan IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 551



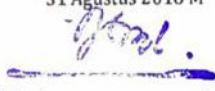
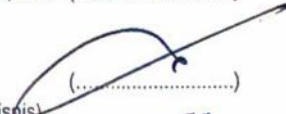


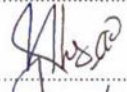

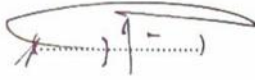
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
 Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ALWATI**, NIM: **10571 01990 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0008/SKY/60201/091004/2018, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H,
31 Agustus 2018 M

Panitia Ujian

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum : | Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (.....) |  |
| | (Rektor Unismuh Makassar) | |
| 2. Ketua : | Ismail Rasulong, SE., MM. (.....) |  |
| | (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | |
| 3. Sekretaris : | Dr. Agussalim HR., S.E., M.M. (.....) |  |
| | (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | |
| 4. Penguji : | 1. Ismail Rasulong, S.E., M.M. (.....) |  |
| | 2. Hj. Naidah, S.E., M.Si. (.....) |  |
| | 3. Drs. Sanusi AM., S.E., M.Si. (.....) |  |
| | 4. Faidhul Adziem., SE., M.Si. (.....) |  |

Disahkan Oleh,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwati

Stambuk : 105710199014

Program Studi : IESP

Dengan Judul : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan".

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apa bila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 26 Agustus 2018



Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ketua,
Jurusan IESP

Hj. Naidah SE., M.Si
NBM: 710 551

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan “

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Almarhum bapak Sapiing dan ibu Alo yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta kakak Juwita Yanti, Elvi , Lisda dan Paman ku Jufri yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
4. Bapak Faidul Adziem, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Skripsi hingga ujian Skripsi.
5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
8. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 16 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

ALWATI, Tahun 2018 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj.Naidah, SE, M. Si dan Pembimbing II Faidzul Adziem, SE.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah. produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar. jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. data yang diolah adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar/ BPS.

Hasil Data yang di peroleh dari badan pendapatan asli daerah atau BPS Kabupaten Kepulauan Selayar di uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorealisasi, uji multikolinearitas, uji heteoskedastitas dan uji normalitas. metode analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda dengan bantuan spss 21. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar. dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini di terima.

Kata kunci :Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk

ABSTRACT

ALWATI, in 2018 the faktor affecting the orginal income of the selayar archipelagic regency of south sulawesi selatan province. thesis program in economics study study the development of economics and business faculties o muhammadiyah university of makassar. supervised by I Hj supervisor. Naidah SE,M.,Si and supervisor II Faidzul Adziem SE.M.,Si.

this researcher aims to find out lokal government expenditure. gross regional, domestic product and total population influence the original regional income of selayar island regency. the type of research used in this study is quantitative. the processed data is secondary data obtanined from the regional original revenue agency, selayar island regency.

the results of the data obtained from the original regional revenue agency of selayar island regency were tested for classical assumptions which consisted of outocorealisation test, multicolinerarty test, detoxification test and normality test. the data analysis method used is multiple linear regression techinques with the help of SPSS 21.

the results showed that local government expenditure, gross regional, domestic product, the number of residents have a positive effect on the orginal income of the selayar archipelago. thus the hypothesis propesed in this study was received.

Keyword: local government expenditure, GRDP, population

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teoritis	9
1. Pendapatan Asli Daerah	9
2. Pajak Daerah	11
3. Retribusi Daerah	12
4. Dana Transfer Pemerintah Pusat	14
B. Hubungan Antar Variabel	17
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17

2. Pengaruh (PDRB) Terhadap (PAD)	18
3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap (PAD).....	18
4. Pengeluaran Pemerintah Terhadap (PAD).....	19
C. Tinjauan Empiris.....	20
D. Kerangka Pikir.....	22
E. Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian	24
C. Defenisi Operasional dan Pengakuan Variabel.....	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis	26
G. Uji Hipotesis.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	33
2. Perkembangan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar	36
3. Keadaan Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar	38
4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	44
B. Pembahasan.....	57
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	perkembangan PAD.....	15
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	36
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	42
Tabel 4.3.	hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4.4	Hasil uji reliabilitas.....	45
Tabel 4.5	Hasil uji multikolonieritas.....	47
Tabel 4.6	Hasil uji Regresi Linier Berganda.....	49
Tabel 4.7	Hasil Uji F.....	50
Tabel 4.8	Hasil Uji T.....	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pikir.....	27
Gambar 4.1	Uji Normalitas	46
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 angka 3 tentang Pemerintah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah otonom tidak terlepas dari persoalan pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan dan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Sesuai dengan Undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 1 angka 3 perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Demikian juga kebijakan mengenai anggaran pendanaan dari pemerintah tingkat atas yang membantu pemerintah daerah dalam mengontrol masalah keuangan dan sebagai alat untuk mempengaruhi

peningkatan pendapatan daerah. Selain itu untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, maka diperlukan kebijakan daerah melalui penetapan peraturan daerah Sehingga tujuan akhir pemanfaatan pendapatan asli daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ekonomi dapat di capai.

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah itu sendiri pendapatan asli daerah (PAD) dari pusat dana perimbangan (DP) serta pendapatan yang lain-lain yang sah. Termasuk bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi.

Adapun data tentang pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (PD), dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2016 dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Selayar
2012-2016

No	Tahun	Dana Perimbangan	Tingkat Pertumbuhan(%)
1	2012	447.384.515.000	84,34
2	2013	523.437.238.000	85,32
3	2014	547,019,012,578	86,32
4	2015	584,523,168,000	86,44
5	2016	774,284,000,020	89,61

Sumber: BPS Kabupaten Selayar (2018).

Berdasarkan tabel diatas bahwa kebijakan umum yang berkaitan dengan dana perimbangan di fokuskan pada peningkatan transfer dana perimbangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi, kunsultasi dengan pemerintah pusat untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak. Untuk dana perimbangan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat positif dari tahun 2012 sebesar Rp 447.384.515.000 tingkat pertumbuhan 84,34% dan tahun 2016 sebesar Rp 774,284,000,020 tingkat pertumbuhan 89,61%.

Pada tabel diatas diketahui bahwa dana perimbangan realisasi anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan fisiknya. Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 3 bahwa dana perimbangan (DP) bertujuan mengurangi kesenjangan fisik antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumber ekonomi dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi iniditentukan oleh pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan ke suksesan suatu daerah jika mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi barang atau jasa yang sifatnya jangka panjang.

Dapat dilihat dari tabel dibawah tingkat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2012-2016 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.2

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2016

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan	Tingkat Pertumbuhan
1	2012	2.464.936,0	2.122.811,8	7,88
2	2013	2.880.860,4	2.296.374,9	8,18
3	2014	3.494.103,6	2.503.349,4	9,01
4	2015	4.148.066,5	2.723.951,2	8,81
5	2016	4.685.984,5	2.924.264,1	7,35

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei Kabupaten Kepulauan Selayar (2018).

Berdasarkan tabel di atas laju perkembangan PDRB ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan lapangan usaha harga berlaku dan harga konstan tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha dan lapangan usaha ekonomi yang lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dan tahun 2016 sama seperti tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah melalui upaya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya adalah meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka menenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat

mempunyai sistem keuangan sendiri baik sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang No.23 tahun 2014 pasal 285 terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 1.3

Realisasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2016

No	Tahun	Realisasi PAD	Rata-rata prekuensi (%)
1	2012	506,189,199,667	13,81
2	2013	608,119,377,623	13,81
3	2014	668,314,867,247	27,06
4	2015	722,528,690,000	11,05
5	2016	898,009,424,020	27,34

Sumber: BPS Kabupaten Selayar (2018)

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurung waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Hal ini pemerintah daerah kabupaten kepulauan selayar terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Hertanto Indrajati dan Sriyana Jaka (2011), menjelaskan bahwa, jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Semakin banyak orang maka akan semakin banyak yang mempunyai bakat dan ide kreatif dalam perkembangan teknologi tenaga ahli

dengan meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah terhadap barang atau jasa. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.4

Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2012	124.553
2	2013	127.220
3	2014	128.774
4	2015	130.199
5	2016	313.605

Sumber: Laporan Realisasi Kab.Selayar BPS
, (2018).

Berdasarkan tabel di atas Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan di tahun 2015 berjumlah 130.199 ditahun 2016 berjumlah sebesar 131.605 orang yang tersebar dari 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bentuk pengeluaran pemerintah tingkat atas. Hal ini memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengontrol masalah pendapatan asli daerah (PAD). Maka menjadi fokus dari permasalahan ini adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah

terhadap pengeluaran pemerintah tingkat atas dan peneliti mengangkat judul “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?

C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor produk domestik regional bruto(PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Data dan informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa .

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat pentingnya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) Menurut UU No.23 tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang diterima dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. (Muh.Zulkifli, 2013:22).

Setiap daerah otonom dalam hal ini baik provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan.

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.(2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus semaksimal mungkin, oleh karena itu (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Landiyanto ,2005) dalam (Arif Eka Atmaja ,2011:11).

Upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu cara tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sasaran yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Meningkatkan efektivitas pemungutan yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. (Halim,2010:153) dalam (Tyasani Taras Dan Luh Gede Sri Artini, 2017:67).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 27 jumlah dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fisik daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang di maksud kapasitas fiskal daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari (PAD) dan dana bagi hasil. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dana

perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.(Safitri, 2009) dalam (Arif Eka Atmaja ,2011:13).

2. Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. (Boediono,2001) dalam (Henri Angriawan, 2015:10).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari : a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air. c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: a) Pajak hotel. b) Pajak restoran. c) Pajak hiburan. d) Pajak reklame. e) Pajak penerangan jalan. f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C . g) Pajak parkir.

Rahayu dalam Hendri Angriawan, (2015:11). Menjelaskan Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) fungsi penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. b) fungsi mengatur (*Reguler*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Retribusi Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010. Bahwa pasal 1-2 angka 4 UU Nomor 28 tahun 2009 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta

pengawasan penyeterannya. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Zuraidah Ida, (2013). Menjelaskan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan:

1. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu.
 - a) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
 - c) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana

ataufasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Dana Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fisik antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah. (Simanjuntak,2001 dalam Muh. Hasan, 2015:14).

Dalam peraturan pemerintah pusat dalam UU No. 55 tahun 2005 dana transfer merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian dari terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dan secara teknis pelaksanaannya. (Veronika Mamuka dan Inggriani Elim, 2014:650).

Dana perimbangan di bentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran penerimaan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, juga membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang

ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari bagi hasil pajak pusat. (Muh.Zulkifli, 2013:24).

Tujuan dari dana perimbangan itu sendiri yakni untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Salah satu peran transfer dari pemerintah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum. Jika dikaitkan dengan teori *Mugrave (1983)* bahwa peran redistributif (pemerataan) dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa terjamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. Fisher (1996) memberikan gambaran bahwa transfer sudah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah ada 3 jenis dana perimbangan. (Muh.Zulkifli, 2013:25).

1. Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dalam (DAU) di sesuaikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi

daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dengan kata lain, dana alokasi umum (DAU) merupakan transfer yang bersifat umum (*blok grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. (Veronika Mamuka dan Inggriani Elim, 2014: 650).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengertian dana alokasi khusus (DAK) diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini diperuntukkan guna membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Singkatnya, dana alokasi khusus (DAK) merupakan transfer yang bersifat khusus (*spesife grant*) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan atau kepentingan nasional. (Veronika Mamuka dan Inggriani Elim, 2014: 650).

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil ini merupakan bagian dari desentralisasi fiskal, yaitu berupa pemberian sebagian persentase (%) pendapatan nasional dari suatu sumber tertentu kepada daerah dimana pendapatan itu diperoleh. Dana bagi hasil (DBH) bisa Berupa Hasil Pajak Dan Hasil Non-Pajak. Dengan kata lain, sumber bagi hasil merupakan bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Pajak Bangunan (PBB) Bea Perolehan Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH). (Veronika Mamuka dan Inggriani Elim, 2014: 650).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto PDRB

Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, provinsi, maupun kabupaten/ kota, digunakan produk domestik regional bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Totalnya nilai barang dan jasa yang produksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai produk domestik regional bruto (PDRB). (Haryanto dalam Atmaja, 2013:13).

Sedangkan pengertian PDRB menurut Saberan dalam atmaja (2013) adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: pertama; Produk artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, kedua; Domestik artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasi oleh penduduk atau bukan. Ketiga; Regional artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. dan keempat; Bruto maksudnya adalah

perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

2. Pengaruh PDRB Terhadap PAD

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah di yakni merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat di negara tersebut. (sukirno 2003 dalam F.Makdalena 2015:732).

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Di Negara sedang berkembang yang mengalami ledakan penduduk jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pertumbuhan ekonomi akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. (Wirosardjon Dalam F.Makdalena, 2015:732).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. (Simanjuntak dalam F. Makdalena,. 2015). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar

terhadap pembangunan suatu wilayah. Menurut. *Population Refence Bureau(PRB)*, (F.Makdalena, 2015).

4. Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD

Menurut Ardiyanto, (2012) dalam Febrian Dwi,(2014) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah menurut Sukirno dalam Sitaniapessy, (2013) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dinikmati orang banyak. Aktivitas pemerintah akan berahli dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial yang pada akhirnya dapat meningkat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah

daerah mengenakan pajak dan retribusi daerah sehingga (PAD) juga meningkat.

C. Tinjauan Empiris

Untuk menjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

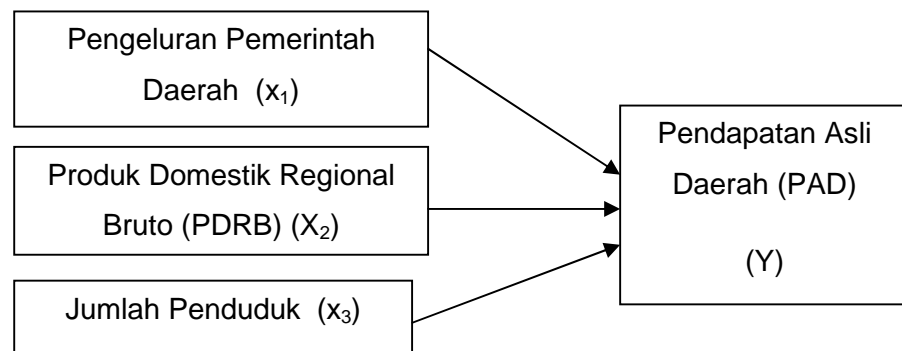
- 1) Eka Putriani (2016), dengan judul” Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Bulukumba” berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode deskriptif secara simultan: variabel retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut berarti Retribusi daerah tidak signifikan tapi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka sewajarnya jika terjadi peningkatan pada Pendapatan Retribusi Daerah maka secara langsung akan mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba pada tahun berjalan. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai beta tersebut berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Arif Eka Atmaja (2011) dengan judul” Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang” berdasarkan hasil penelitian variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruton (PDRB) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara individual, variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, yang memiliki pengaruh terbesar dibuktikan dengan nilai koefisien tertinggi yaitu 5.742.

- 3) Henri Angriawan (2015) dengan judul” Analisis Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata dan Perannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2007-2011” hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor wisata pariwisata menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas keempat penerimaan tersebut berada pada kategori sangat efektif. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif berupa analisis efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan di BPS Kabupaten Maros dan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.
- 4) Umdatul Husna (2015) dengan judul” Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD di Daerah Kota Sejava Tengah” hasil penelitan yang diperoleh dengan program Eviews 7 bahwa nilai R^2 sebesar 0,669109 menunjukkan variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, pengeluaran pemerintah sebesar 66,9 persen. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode analisis *Ordinary Least Squares (OLS)*. dan aktivitas perekonomian di Daerah Kota Sejava Tengah berkembang dengan baik, sedangkan PAD dapat meningkat melalui penarikan pajak daerah.

Dalam penelitian ini terjadi perbedaan dari penelitan terdahulu yang diambil oleh peneliti, diantara lokasi penelitian, kondisi keuangan daerah, variabel penelitian dan periode penelitian. Bedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu, lebih didasarkan pada asumsi bahwa setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan, kondisi serta potensi ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, agar nantinya bermanfaat untuk menambah penerimaan daerah.

D. Kerangka Pikir

Membuktikan pendapatan asli daerah oleh Pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk merupakan hubungan fungsional Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini kerangka pikir di gambarakan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

E. Hipotesis

Berdasarkan penelitian oleh Arif Eka Atmaja (2011), menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dari penelitian tersebut maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1: Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- H2: Diduga bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

H3: Diduga bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif-kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan selayar tahun 2012 sampai tahun 2016 yang akan diuji secara empiris.

Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dari hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Kota Benteng. Pemilihan Kota Benteng sebagai objek dan lokasi daerah penelitian dikarenakan untuk memudahkan pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun waktu yang di rencanakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih (dua) bulan.

C. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran

1. Variabel Independen dan Dependen

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen (Y) adalah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Variabel independen (X_1) adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Variabel Independen (X_2) adalah PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Variabel Independen (X_3) adalah jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Definisi Operasional

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut badan pusat statistik (BPS) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Kepulauan Selayar (dalam satuan Rupiah).

b) Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah menurut badan pusat statistik (BPS) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

c) Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) menurut badan pusat statistik (BPS) adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah

(regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar harga konstan (dalam satuan rupiah).

d) jumlah penduduk menurut badan pusat statistik (BPS) adalah orang yang tinggal di kabupaten atau kota.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif yang merupakan data primer dan data sekunder yang kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2016. Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk yang di dapat dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik (PBS) Kabupaten Kepulauan Selayar, perpustakaan kampus UNISMUH, buku-buku dan laporan –laporan yang berakitan dengan penulisan ini

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan berbentuk sekunder yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengumpulan data yang diteliti lima tahun terakhir tahun 2012-2016

F. Teknik Analisis

Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Pengeluaran Pemerintah Daerah

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto

X_3 = Jumlah Penduduk

μ = Error term

G. Uji Hipotesis

Selanjutnya perlu dilakukan adanya uji asumsi klasik dan uji statistik.

a) Uji Asumsi Klasik

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini di khususkan pada pegolahan gejala autokorelasi, multikolinearitas, heterokeditas dan normalitas.

1. Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkolerasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Jika terdapat autokorelasi, maka parameter yang diestimasi akan bisa dan variannya tidak minimal. Dalam penelitian ini autokerelasi dideteksi dengan menggunakan metode *Durbin Watson (DW test)*. Nilai DW yang diperoleh dibandingkan dengan dL pada tabel statistik dari *Durbin Watson*.

$du < dw < 4-du$	= tidak ada autokorelasi
$dw < dL$	= ada autokorelasi positif
$dw > 4-dL$	= ada autokorelasi negative
$du < dw < dL$	= tidak dapat disimpulkan

2. Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel bebasnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Menurut Imam Ghozali 2009, Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk mengukur ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah nilai tolerance dengan batas minimal sebesar 0,10 atau nilai VIF maksimal 10.

3. Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya varians yang tidak sama dari setiap unsur gangguan. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik jenis heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat grafik scatterplot. Apabila dalam grafik scatterplot tidak menunjukkan suatu pola maupun bentuk tertentu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung Heteroskedastisitas.

4. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji normalitas data ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik uji normalitas normal plot. Model regresi memenuhi asumsi normalitas bila memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal. (Ghozali, 2005).

b) Uji Statistik

1. Penafsiran Koefisien Determinasi (R²)

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang di Simbolkan dengan R². Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jika nilai R² kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tidak ada keterkaitan.
- b. Jika nilai R² mendekati 1 (satu), berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan.

2. Pengujian Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F)

Algifari dalam Made, (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Caranya adalah dengan membandingkan antara lain kritis F_{tabel} dengan nilai F_{hitung} yang terdapat pada tabel *Analysis Variance* dari hasil perhitungan. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel independen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan semua variabel independen.

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, variabel bebas (X) yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan tidak ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

H_1 : paling tidak salah satu koefisien (β) $\neq 0$, variabel bebas (X) yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

Pada tingkat signifikan (α) 5% pengambilan keputusan menggunakan pengujian sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti bahwa secara bersama-sama variabel (X) tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ variabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa secara bersama-sama variabel (X) berpengaruh terhadap (Y).

3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Imam Ghozali 2005 dalam Husna 2015:45), Uji t dilakukan untuk memastikan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- a. H_0 : $b_1 \leq 0$, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_1 > 0$, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

- b. $H_0 : b_2 \geq 0$, variabel jumlah penduduk secara individu berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_2 < 0$, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

- c. $H_0 : b_3 \leq 0$, variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_3 > 0$, variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengembalian keputusan :

- a. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti bahwa secara individu variabel (X) tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).
- b. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa secara individu variabel (X) berpengaruh terhadap variabel (Y).

4. Koefisien Determinasi

Duwi priyanto dalam made (2011), analisis determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui prosesi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel independen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase nilai variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Berikut adalah dua sifat R^2 .

- a. R^2 merupakan besaran non negatif.
- b. Batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Suatu R^2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Damodar Gujarati (2009) ,Dalam hubungan regresi, R^2 adalah ukuran yang lebih berarti dari pada R karena R^2 mengatakan bahwa persivariansi adalah variabel tak bebas yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan dan karenanya memberikan suatu ukuran keseluruhan mengenai sejauh mana variasi dalam suatu variabel menentukan variasi dalam variabel lain tetapi R tidak mempunyai sepertiitu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten kepulauan selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi sulawesi selatan Ibu kota kabupaten selayar adalah Benteng. Kabupaten kepulauan selayar memiliki luas keseluruhan wilayah kabupaten selayar adalah 10.503,69 km² dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146.66 km², dengan panjang garis pantai 670 km. Secara administrasi, pada tahun 2015 pemerintah kabupaten kepulauan selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan.

Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Sejalan dengan adanya dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat Kabupaten Selayar yang menginginkan adanya perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Maritim Selayar yang dilandasi pemikiran bahwa Kabupaten Selayar wilayahnya

mencakup beberapa pulau besar dan pulau kecil. Dorongan dimaksud antara lain perlu dilakukan dengan perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Maritim Selayar.

Berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Selayar tersebut, Bupati Selayar melalui Surat Nomor 125.1/III/06/Hukum tanggal 8 Maret 2006 Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar menyampaikan permohonan persetujuan perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Maritim Selayar. Selanjutnya Bupati Selayar Dengan Surat Nomor 135/173/XII/06/DPK tanggal 29 Desember 2006 kepada Gubernur Sulawesi Selatan memohon dukungan perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Maritim Selayar.

Menindak lanjuti Surat Bupati Selayar tersebut di atas, Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor 135/896/OTODO Tanggal 26 Februari 2007 Kepada Menteri dalam Negeri Memohon Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Maritim Selayar untuk dapat diproses. Pada perkembangan selanjutnya, setelah melalui kajian Terminologis dan Etimologi oleh Tim Pakar Toponimi dan Kelautan, nama Maritim tidak layak digunakan sebagai nama rupabumi karena maritim hanyalah program yakni kegiatan pembangunan yang terkait dengan laut. Di samping itu sesuai konservasi PBB tentang Hukum Laut yang telah diartifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

, tidak dikenal adanya Negara Maritim melainkan Negara Kepulauan, dengan demikian maka nama Kabupaten Selayar selanjutnya diusulkan diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Surat Bupati Kabupaten Selayar Nomor 135.8/17/1/08/ Pemerintah tanggal 22 Januari 2008 perihal permohonan persetujuan perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar sepakat untuk mengubah nama Maritim menjadi kepulauan melalui keputusan nomor 05 Tahun 2008 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Selayar terhadap perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Gambar Lokasi Penelitian dan Letak Geografis

Lokasi Penelitian ini adalah Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Jalan R.E Martadinata No.5, Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruhwilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Kabupaten kepulauan selayar terletak antara $5^{\circ}45'-7^{\circ}35'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}15'-122^{\circ}30'$ Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gugusan pulau yang terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi yang secara administrasi menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai salah satu kabupaten dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari pulau sulawesi selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores Dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel : 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Pasimarannu	195,33	14,39
2	Pasilambena	114,88	8,46
3	Pasimassunggu	131,80	9,71
4	Takabonerate	49,30	3,63
5	Pasimassunggu Timur	67,14	4,95
6	Bontosikuyu	248,16	18,29
7	Bontoharu	128,12	9,44
8	Benteng	24,63	1,81
9	Bontomanai	136,42	10,05
10	Bontomatene	193,23	14,24
11	Buki	68,14	5,02
Kab. Kepulauan Selayar		1.357,15	100,00

Sumber: Dinas Perdayaan Masyarakat 2018

2. Perkembangan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

Perkembangan penduduk selalu terjadi di suatu daerah tak kecuali kabupaten kepulauan selayar. Perkembangan terjadi melalui kelahiran,

kematian, datang dan pindah (migrasi) yang disebut mutasi penduduk. Berdasarkan data BPS tahun 2016, penduduk kabupaten kepulauan selayar pada tahun 2015 berjumlah 130,199 jiwa sedangkan tahun 2016, berdasarkan data BPS jumlah penduduk kabupaten kepulauan selayar sebesar 131,605 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan yaitu Benteng sebanyak 24.414 jiwa.

Berdasarkan data yang ada dapat di ketahui bahwa perkembangan penduduk kabupaten kepulauan selayar selama beberapa tahun terakhir sentiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan berfluktuasi.

Dilihat dari tabel dibawah gambaran lebih rinci jumlah penduduk dan laju pertumbuhan menurut kecamatan di kabupaten kepulauan selayar tahun 2012-2016.

Tabel : 4.2

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kecamatan Tahun 2012-2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan %
	2012	2013	2014	2015	2016	
Jumlah	124.553	127.220	128.744	130.199	313.605	5,91

sumber:Badan Pusat Statistik 2018

Dilihat dari tabel di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2012 adalah 124.553 jiwa dan pada tahun 2014

menjadi 128.744 jiwa. Sedangkan data terakhir tahun 2015 dan 2016, jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 130.199 jiwa dan di tahun 2016 sebanyak 313.605 jiwa atau pertumbuhan rata-rata 5,91 % pertahun dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Sementara laju pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 2014 sampai tahun 2015 sebesar 0,97% pertahun. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Benteng yaitu 25.020 jiwa, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Buki yakni ,6.382 jiwa

3. Keadaan Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah kabupaten/kota sejak tahun 2004, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan dan juga mempercepat pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah tingkat tabungan masyarakat. Artinya , semakin besar jumlah pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat di himpun oleh pihak perbankan. Begitu pula

sebaliknya, apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun maka kecenderungan untuk menabung juga akan semakin rendah.

Dilihat dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 8,99 % pertahun. Realisasi pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 30,26 % pertahun. Sekalipun rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar relatif cukup tinggi, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata 3,71 % pertahun. Sehingga ketergantungan pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Kepada pemerintah tingkat atas rata-rata sekitar 96,29%. Rendahnya penerimaan PAD dapat di pengaruhi oleh: (1) pendapatan target penerimaan tidak berdasarkan potensi pendapatan persektor penerimaan; (2) hilangnya peluang pendapatan akibat keterlambatan dan atau ketidak konsisten pemungutan; (3) terjadi penguapan pendapatan akibat lemahnya pencatatan pemungutan; dan (4) potensi pendapatan yang tidak dijadikan obyek pengutan.

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan keusaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 di hasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Peningkatan yang terjadi pada pendapatan masyarakat dalam suatu daerah dapat dilihat pada kemajuan perekonomian dengan mencermati nilai dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terjadi pada daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi menjadi dua yaitu PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB berdasarkan harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi), pendapatan dan pengeluaran yang dinilai berdasarkan harga tetap (konstan). Sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010 (2010=100) yang menggantikan tahun dasar lama yaitu tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru karena adanya perubahan harga dari tahun ke tahun, menyebabkan PDRB berdasarkan harga berlaku juga turun berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, PDRB berdasarkan harga berlaku tidak dapat memberikan gambaran tentang perubahan daya beli masyarakat. Jadi dalam penulisan ini, PDRB yang dipakai adalah PDRB berdasarkan harga konstan karena dengan PDRB berdasarkan harga konstan ini, harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasikan ini digunakan harga tahun 2010, sehingga kita bisa membandingkan dan melihat bagaimana daya beli masyarakat tingkat kesejahteraan serta laju pertumbuhan ekonomi. Selain, PDRB berdasarkan harga konstan ini juga bisa digunakan output pada tahun yang berbeda apabila ditinjau dari segi pendapatan, PDRB disebut *regional income* yang menunjukkan jumlah

pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh masyarakat karena keikut sertaannya dalam proses produksi. Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku.

Tabel: 4.3

**Lapangan Usaha Menurut Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2016**

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian	1.061.392,7	1.246,101,8	1.580.000,0	1.193.920,0	2.176.963,7
Pertambangan	19.078,9	23.791,9	31.332,4	40.300,4	47.587,8
Industri pengolahan	77.392,3	87.581,4	98.236,6	180.399,9	121.406,7
Pengadaan listrik	2.806,9	2.580,1	2.870,7	2.993,0	3.397,3
Pengadangan air	3.244,4	3.625,1	4.046,7	4.204,6	4.513,5
Konstruksi	433.433,7	544.596,1	677.643,3	810.690,5	953.813,0
Perdagangan besar-kecil	212.122,0	234.962,3	263.205,5	301.646,4	355.887,1
Trasportasi dan pegudangan	55.734,0	64.882,2	81.132,9	99.026,3	110.682,5
Konsumsi	5.613,2	6.137,6	7.146,5	8.150,9	9.301,9
Informasi dan komunikasi	66.959,3	75.650,7	81.067,0	85.964,9	95.928,7
Jasa keuangan	28.920,4	35.502,1	42.274,3	50.555,8	59.778,2
Real estate	40.041,8	45.791,7	52.903,6	60.015,4	67.773,1
Jasa perusahaan	386,1	447,4	583,9	690,4	803,9
Administrasi pemerintahan	248.903,7	270.545,1	304.514,6	363.473,6	336.022,1

Jasa pendidikan	125.108,2	174.620,2	193.348,2	214.452,6	245.790,3
Jasa kesehatan	45.520,5	51.184,1	58.937,3	66.690,5	76.585,3
Jasa lainnya	11.277,7	12.828,7	14.859,9	16.891,1	19.749,7
PDRB	2.464.930,0	2.880.860,4	3.949.103,6	4.148.066,5	4.685.984,5

Sumber: BPS Kabupaten selayar 2018

Tabel :4.4

Lapangan Usaha Menurut Harga Konstan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2016

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian	906.778,0	967.719,7	1.084.850,3	1.188.543,9	1.293.676,4
Pertambangan	15.975,4	17.623,9	19.984,2	22.164,5	24.418,2
Industri pengolahan	71.124,2	76.404,3	80.529,7	84.955,2	90.954,8
Pengadaan listrik	2.935,1	3.179,3	3.563,8	3.866,8	4.319,6
Pengadangan air	3.058,5	3.338,0	3.535,4	3.567,7	3.781,5
Konstruksi	349.433,6	396.697,4	430.618,9	473.435,3	519.783,5
Perdagangan besar-kecil	188.800,4	203.424,3	221.138,4	237.819,6	265.993,4
Trasportasi ,pegudangan	48.198,2	52.394,1	58.021,3	62.604,6	68.410,7
Konsumsi	5.107,4	5.422,8	5.691,2	5.975,5	6.529,4
Informasi dan komunikasi	64.480,0	71.893,3	76.779,1	84.881,3	92.457,8
Jasa keuangan	24.495,4	28.022,5	28.693,6	31.674,1	36.480,4
Real estate	36.496,1	39.683,6	43.064,3	46.445,3	49.916,8
Jasa perusahaan	330,6	378,6	426,1	451,9	488,8
Administrasi pemerintah	217.814,5	229.423,0	236.986,3	254.529,6	227.346,5

Jasa pendidikan	136.995,3	146.810,2	151.894,4	161.671,1	173.128,0
Jasa kesehatan	40.454,5	43.046,1	45.991,2	48.936,2	52.886,1
Jasa lainnya	10.334,7	10.913,6	11.671,3	12.428,9	13.691,9
PDRB	2.122.811,8	2.296.374,9	2.503.349,4	2.723.951,2	2.924.264,1

Sumber: BPS Kabupaten Selayar 2018.

tabel :4.5

Perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2012-2016

Tahun	Harga berlaku	Harga konstan 2010	Pertumbuhan ekonomi (%)
2012	2.464.930,0	2.122.811,8	7,88
2013	2.880.860,4	2.296.374,9	8,18
2014	3.949.103,6	2.503.349,4	9,01
2015	4.148.066,5	2.723.951,2	8,81
2016	4.685.984,5	2.924.264,1	7,35

Sumber :BPS Kabupaten Selayar 2018.

Pada tabel 4.2.1 perkembangan PDRB teru mengalami peningkatan di mana pada periode 2012 posisi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar atas harga berlaku dan harga konstan tingkat perumbuhannya mencapai 7,88 % dan di tahun 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 8,18 % sampai 9,01 % tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Selaya. Di tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dalam 1% tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan selayar.

Namun secara umum, pengaruh peningkatan dan penurunan PDRB di Kabupaten Kepulauan Selayar di pegaruhi oleh sektor-sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diterapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah.

Tabel : 4.6

**Target Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2012-2016**

Tahun	Dana Perimbangan	Target	Rata-rata Pertumbuhan %
2012	436,943,371,127	447,384,515,000	84,34
2013	519,597,570,386	523,437,238,000	85,32
2014	547,019,012,578	552,118,043,000	86,32
2015	584,523,168,000	774,284,000,020	86,44
2016	774,284,000,020	801,075,808,020	89,61

Sumber: BPS Kabupaten Selayar 2018.

Dana Perimbangan Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU). kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah kabupaten kepulauan selayar sebagaimana dilihat dari tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut, realisasi dana perimbangan pada tahun 2012 sebesar Rp 436,943,371,127 dan target penerimaan sebesar Rp 447,384,515,000 dan tingkat pertumbuhan 88,38 %, tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 519,597,570,386 dan target penerimaan sebesar Rp 523,437,238,000 dan tingkat pertumbuhan 84,96 %, dan di tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 547,019,012,578 dan target penerimaan sebesar Rp 552,118,043,000 tingkat pertumbuhan 81,1%.

F. Teknik Analisis

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap kedua variabel independen, yaitu Motivasi dan Disiplin Kerja dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	11.241	.107	
1 PPD	4.869E-013	.000	.513
PDRB	1.410E-008	.000	.493
JUMLAH PENDUDUK	.019	.031	.074

Sumber : Lampiran hasil pengolahan data 2018

Berdasarkan tabel 4.9 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen pada kolom Beta. Berdasarkan tabel 4.9 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 11.241 + 0.513X_1 + 0.493X_2 + 0.074X_3 + \epsilon$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Konstanta sebesar 11.241 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) adalah sebesar 11.241%.
- b. Koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X1) sebesar 0,513 berarti setiap perubahan yang terjadi (peningkatan) sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 0,513%.
- c. Koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) sebesar 0.493 berarti setiap perubahan yang terjadi (Peningkatan) sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan sebesar 0.493%.
- d. Koefisien variabel Pertumbuhan penduduk (X3) sebesar 0.074 berarti setiap perubahan yang terjadi (Peningkatan) sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan sebesar 0.074%.

c) Uji Asumsi Klasik

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini di khususkan pada pengolahan gejala autokorelasi, multikolinearitas, heterokeditas dan normalitas.

5. Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Jika terdapat autokorelasi, maka parameter yang diestimasi akan bisa dan variannya tidak minimal. Dalam penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode *Durbin Watson (DW test)*. Nilai DW yang diperoleh dibandingkan dengan dL pada tabel statistik dari *Durbin Watson*.

- $du < dw < 4-du$ = tidak ada autokorelasi
- $dw < dL$ = ada autokorelasi positif
- $dw > 4-dL$ = ada autokorelasi negative
- $du < dw < dL$ = tidak dapat disimpulkan

deskripsi auto korelasi dengan melihat nilai Durbin Watson pada penelitian ini dapat dilihat pada table 4.8 dibawah ini:

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.989	30.478	3	1	.132	2.460

Sumber : Lampiran hasil pengolahan data 2018

Dari table diatas terlihat nilai Durbin Watson sebesar 2.460. Nilai ini yang diperoleh dari hasil olah data SPSS tidak memiliki perbandingan nilai Durbin

Watson pada table durbin Watson yang di akibatkan oleh sedikitnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam menilai ada tidaknya auto korelasi dalam data penelitian tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini demi mengetahui ada tidaknya auto korelasi pada penelitian maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Run test Nilai yang diperbandingkan dalam table run test untuk menentukan auto korelasi adalah nilai Asymp .Sig. (2-tailed) dengan nilai signifikansi. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji run test adalah Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0.05 maka terdapat gejala auto korelasi, sebaliknya jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0.05 maka tidak terjadi gejala auto korelasi. Hasil uji auto korelasi berdasarkan run test dapat dilihat pada table 4.9 dibawahini:

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00030
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber : Lampiran hasil pengolahan data 2018

Dari table diatas terlihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1 (satu) yang akan di perbandingkan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang terdapat pada run test diatas lebih besar dari 0.05 sehingga kesimpulan dari uji auto korelasi adalah tidak

terdapat gejala atau masalah korelasi. Maka dengan demikian pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

6. Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel bebasnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Menurut Imam Ghozali 2009, Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk mengukur ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah nilai tolerance dengan batas minimal sebesar 0,10 atau nilai VIF maksimal 10. Interpretasi hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table 4.10 dibawah ini.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PPD	.106	9.445
PDRB	.103	9.709
JUMLAH PENDUDUK	.723	1.383

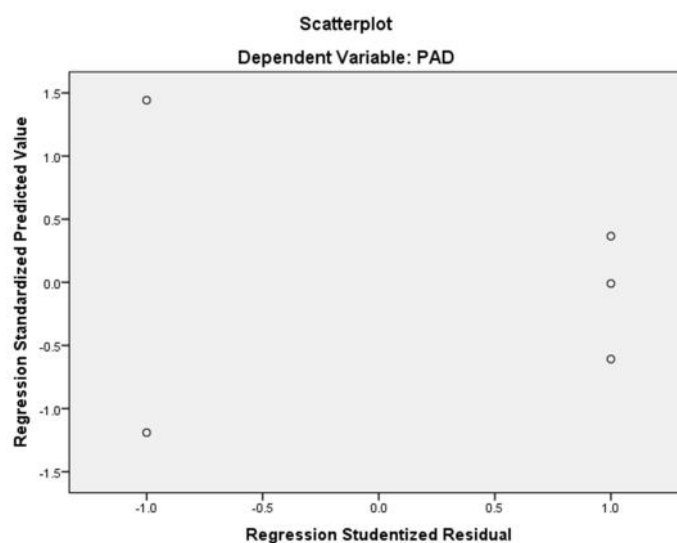
Sumber : Hasil pengolahan data 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari kedua variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

7. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan grafik plot. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



gambar: 4.1

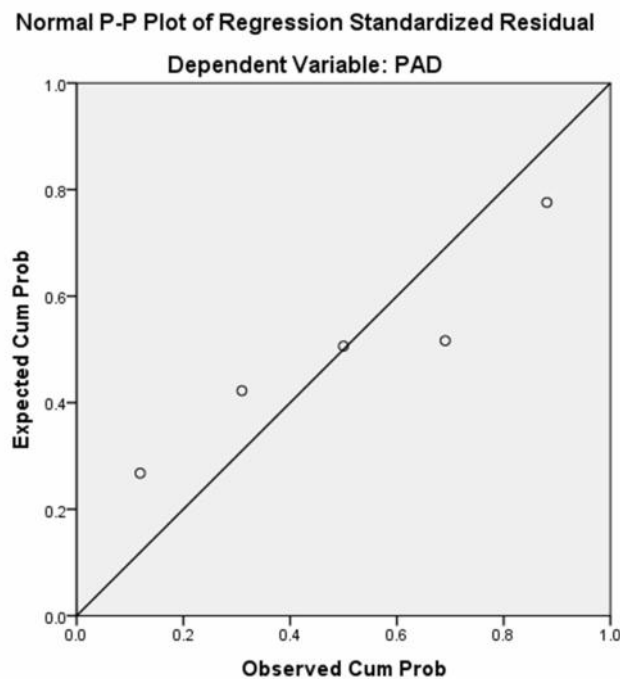
Sumber : Lampiran hasil pengolahan data 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar diatas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

8. Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dapat dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data

dinyatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0,05, dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas yang digunakan dari hasil penelitian ini adalah *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual*, Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



gambar: 4.2

Sumber : Lampiran hasil pengolahan data 2018.

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot diatas, dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal terlihat titik-titik yang penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-plot menunjukkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal.

d) Uji Statistik

4. Penafsiran Koefisien Determinasi (R²)

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang di Simbolkan dengan R². Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jika nilai R² kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tidak ada keterkaitan.
- b. Jika nilai R² mendekati 1 (satu), berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan.

Angka koefisien determinasi dilihat dari hasil perhitungan SPSS 21

Tabel 4.11 hasil Analisi Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.989	.957	.01914

Sumber: Lampiran hasil olah data 2018

Koefisien Determinasi ditunjukkan pada angka R square adalah 0.989 menunjukkan bahwa 98,9 % variasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (x1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) dan, Jumlah Penduduk (x3). Sedangkan sisanya sebesar 1.1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan dimana hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen.

5. Pengujian Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F)

Algifari dalam Made, (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Caranya adalah dengan membandingkan antara lain kritis F_{tabel} dengan nilai F_{hitung} yang terdapat pada tabel *Analysis Variance* dari hasil perhitungan. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel independen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan semua variabel independen.

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, variabel bebas (X) yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan tidak ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

H_1 : paling tidak salah satu koefisien (β) $\neq 0$, variabel bebas (X) yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

Pada tingkat signifikan (α) 5% pengambilan keputusan menggunakan pengujian sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti bahwa secara bersama-sama variabel (X) tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ variabel maka H_0 diterima dan H_1 diterima, berarti bahwa secara bersama-sama variabel (X) berpengaruh terhadap (Y).

Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada table 4.12 berikut ini.

Tabel: Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.033	3	.011	30.478	.132 ^b
	Residual	.000	1	.000		
	Total	.034	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, PPD, PDRB

Sumber : Lampiran hasil pengolahan data 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 30.478 dengan signifikansi sebesar 0.132. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0.05 dan nilai F hitung lebih besar dari F table dengan nilai sebesar 6.591 yang diperoleh dari perhitungan rumus FINV pada Microsoft excel, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa variabel independen sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam hal ini pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y)

yaitu pendapatan asli daerah (PAD) atau dengan kata lain menolak hipotesis H_0 .

3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Imam Ghozali 2005 dalam Husna 2015:45), Uji t dilakukan untuk memastikan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

a. $H_0 : b_1 \leq 0$, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_1 > 0$, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

b. $H_0 : b_2 \geq 0$, variabel jumlah penduduk secara individu berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_2 < 0$, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

c. $H_0 : b_3 \leq 0$, variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1 : b_3 > 0$, variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengembalian keputusan :

- a. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti bahwa secara individu variabel (X) tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).
- b. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, berarti bahwa secara individu variabel (X) berpengaruh terhadap variabel (Y).

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai koefisien parsial dari masing-masing variabel independen terhadap dependennya sebagai mana terlihat pada gambar berikut.

Tabel 4. 13 Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.241	.107		105.020	.006
1 PPD	4.869E-013	.000	.513	1.605	.355
PDRB	1.410E-008	.000	.493	1.520	.370
JUMLAH PENDUDUK	.019	.031	.074	.602	.655

Sumber : Hasil pengolahan data 2016

- 1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Variabel Pengeluaran pemerintah daerah dengan t hitung (1.605) $< t$ tabel (2.570) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran pemerintah daerah (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD) (Y) pada Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 2) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) dengan t hitung (1.520) < t tabel (2.570) maka dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB) (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) pada Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 3) Pengaruh Jumlah Penduduk (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Variabel jumlah penduduk dengan t hitung (0.602) < t tabel (2.570) maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk (X3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y) pada Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. PEMBAHASAN

- 1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.13 variabel modal mempunyai tingkat signifikansi 0.355 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.605. Hal ini berarti menolak hipotesis H_0 yang di ajukan sehingga dapat dikatakan bahwa Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan nilai sebesar 2.000298. dan nilai sig pada tabel lebih besar dari 0.05. dan disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Kepulauan Selayar.

dengan demikian pengeluaran pemerintah memberikan peluang terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar karena itu pemerintah harus memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerahnya.

- 2) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

Hasil Uji Hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.370 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.520. Hal ini berarti menolak hipotesis H_0 yang di ajukan sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah pengunjung berpengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan nilai sebesar 2.570 . dan nilai sig pada tabel lebih besar dari 0.05. maka di simpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB) (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) kabupaten kepulauan selayar. oleh karena itu dari sektor-sektor lain harus perlu di tingkat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan selayar.

- 3) Pengaruh Jumlah Penduduk (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil Uji Hipotesis satu dan dua dilihat pada tabel 4.13, variabel jumlah penduduk (X3) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,655

dengan nilai t_{hitung} sebesar 620. Hal ini berarti menolak hipotesis H_0 yang di ajukan sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah pengunjung berpengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan nilai sebesar 2.570 . dan nilai sig pada tabel lebih besar dari 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk (X_3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y) pada Kabupaten Kepulauan Selayar. jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beberapa hal dapat di simpulkan sebagai berikut.

- a. variabel pengeluaran pemerintah daerah (PPD) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar.
- b. variabel produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar
- c. variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar.
- d. **Pengujian Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F)** menunjukkan nilai F hitung sebesar 30.478 dengan signifikansi sebesar 0.132. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0.05 dan nilai F hitung lebih besar dari F table dengan nilai sebesar 6.591. hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam hal ini pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD) atau dengan kata lain menolak hipotesis H₀.

e.

f. **Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Saran

- a. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang optimal sebaiknya pihak pemerintah daerah kabupaten kepulauan selayar membantu dalam mengupayakan pengikatan pendapatan daerahnya sendiri baik dari sektor lain .
- b. sebaiknya pemerintah daerah kabupaten kepulauan selayar memberikan kemajuan dalam bidang pendapatan lain untuk meningkatkan perekonomiannya
- c. pemerintah kabupaten kepulauan selayar memberikan strategi kepada penduduknya untuk memberikan peluang yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Asra Afifa dan Syahril Netti, (2013). *Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 1-2 Pajak daerah dan retribusi daerah* <https://www.slideshare.net>. Politeknik Negeri Padang.
- Atmaja , Eka, Arif Atmaja, 2011, Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Jumlah Penduduk, Domestik Regional Bruto (PDRB Di Kota Semarang: *Dinamika Pengeluaran Pemerintah*, 19 september 2011, hal, 24-28.
- Boediono,. 2001 dan Henri Angriawan ,.2015. *Analisis Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata dan Peranaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2007-2011*. E-Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Vol,.1 No.10,2015.
- F. Makdalena Asmuruf,. 2015: 732. *Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Ilmu Ekonomi Pembangunan,. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia. Vol 15,. No. 05 tahun 2015.
- Halim, Abdul,. Taras Tyasani and Artini Sri Gede Luh. 2010:153 Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana Denpasar , Vol.6,No.5, 2017: 2360-2387*.
- Mamuka Veronika dan Elim Inggriani,. 2014: 650. *Analisis dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talau*. Jurnal EMBA Akuntansi Universitas Sam Ratulagi Manado. Vol.2 No. 1 Maret 2014 hal 650-650.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No.69 Tahun 2010,. *Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta 18 oktober 2010. Presiden Republik Indonesia.

Simanjuntak,2001 dan Hasan. Muh, 2015. *Pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan*. Jurnal Economix Universitas Negeri Makassar Vol ,.2 No. 1 Januari 2015. Hal 14.

Sumber : Sumber: Program Percepatan Pembangunan Strategi Sanitasi Pemukiman *Kabupaten Kepulauan Selayar*,Dalam rangka 2016. Pokja Sinitasi, BAPPEDA.

Sumber : Hasil Sensus, Survei *Kabupaten Kepulauan Selayar* dalam rangka 2017

Undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 3 *Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan*. UU RI. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 Otonomi Daerah. *Tentang Pemerintah Daerah*. UU. Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 285 Pendapatan Asli Daerah. *Tentang pemerintah daerah*. UU RI.

Zulkifli. Muhammad,. 2013 *Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan*.

Zuraida, Ida. Januari 2012, september 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta 13220: sinar grafika. Jl. Sawo Raya.

**L
A
P
I
R
A
N**



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SELAYAR

JL.RE Martadinata No. 4 Benteng, Kabupaten Selayar

Telp/Fax (0414)-21037 Kode Pos: 92812

Homepage:<http://selayarkab.bps.go.id>

Email:bps7301@bps.go.i

Nomor : _____ kepada
Lampiran :- Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
perihal : **Izin Penelitian** Di-
Tempat

Mendasari surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 070/40/kesbang/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, perihal izin penelitian, Disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alwati
Nomor stambuk : 105710199014
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : IESP
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.234

Telah mengadakan penelitian di Badan Puast Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari tanggal 26 mei s/d 26 juli 2018. Demikian di sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Benteng, 26 Juli 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kepulauan Selayar

Ir. Muhammad Kamil

NIP.196804291994011001

Lampiran 1

TAHUN	PPD (X1)	PDRB (X2)	Jumlah Penduduk (X3)	PAD (Y)
2012	447,384,515,000	2,122,811,8	124,553	506,189,199,667
2013	523,437,238,000	2,296,374,9	127,22	608,119,377,623
2014	547,019,012,578	2,503,349,4	128,774	668,314,867,247
2015	584,523,168,000	2,723,951,2	130,199	722,528,690,000
2016	774,284,000,020	2,924,264,1	313,605	898,009,424,020

Lampiran 2

Regression

Notes

Output Created		18-AUG-2018 05:22:57
Comments		
Input	Active	DataSet0
	Dataset	
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	5
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION
		/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
		/MISSING LISTWISE
		/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
		/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
		/NOORIGIN
		/DEPENDENT Y
		/METHOD=ENTER X1 X2 X3
		/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID)
		/RESIDUALS DURBIN
	HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)	
	/SAVE RESID.	
Resources	Processor Time	00:00:02.32
	Elapsed Time	00:00:02.27
	Memory Required	1956 bytes

Descriptive Statistics

Mean	Std. Deviation	N
11.8251	.09199	5
575329586719.6	121995518718.5	5
000	8131	
25141502.8000	3212858.35534	5
.3767	.36044	5

Correlations

		PAD	PPD	PDRB	JUMLAH PENDUDUK
Pearson Correlation	PAD	1.000	.967	.980	.140
	PPD	.967	1.000	.926	-.033
	PDRB	.980	.926	1.000	.168
	JUMLAH PENDUDUK	.140	-.033	.168	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.004	.002	.411
	PPD	.004	.	.012	.479
	PDRB	.002	.012	.	.394
	JUMLAH PENDUDUK	.411	.479	.394	.
N	PAD	5	5	5	5
	PPD	5	5	5	5
	PDRB	5	5	5	5
	JUMLAH PENDUDUK	5	5	5	5

Variables Entered/Removed^a

Variables Entered	Variables Removed	Method
JUMLAH PENDUDUK, PPD, PDRB ^b		Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.995 ^a	.989	.957	.01914	.989	30.478	3	1	.132	2.460

a. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, PPD, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.033	3	.011	30.478	.132 ^b
	Residual	.000	1	.000		
	Total	.034	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), JUMLAH PENDUDUK, PPD, PDRB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.241	.107		105.020	.006		
	PPD	4.869E-013	.000	.513	1.605	.355	.106	9.445
	PDRB	1.410E-008	.000	.493	1.520	.370	.103	9.709
	JUMLAH PENDUDUK	.019	.031	.074	.602	.655	.723	1.383

a. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PPD	PDRB	JUMLAH PENDUDUK
1							

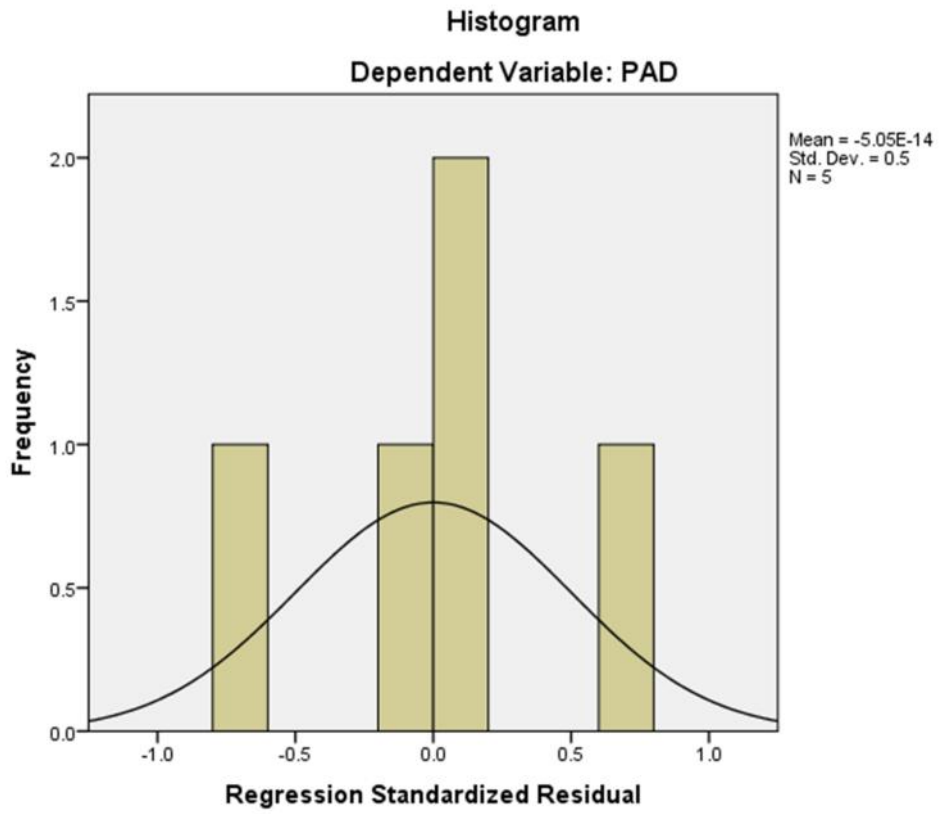
1	3.633	1.000	.00	.00	.00	.02
2	.349	3.228	.00	.00	.00	.70
3	.017	14.501	.21	.09	.00	.01
4	.001	63.891	.79	.91	1.00	.27

a. Dependent Variable: PAD

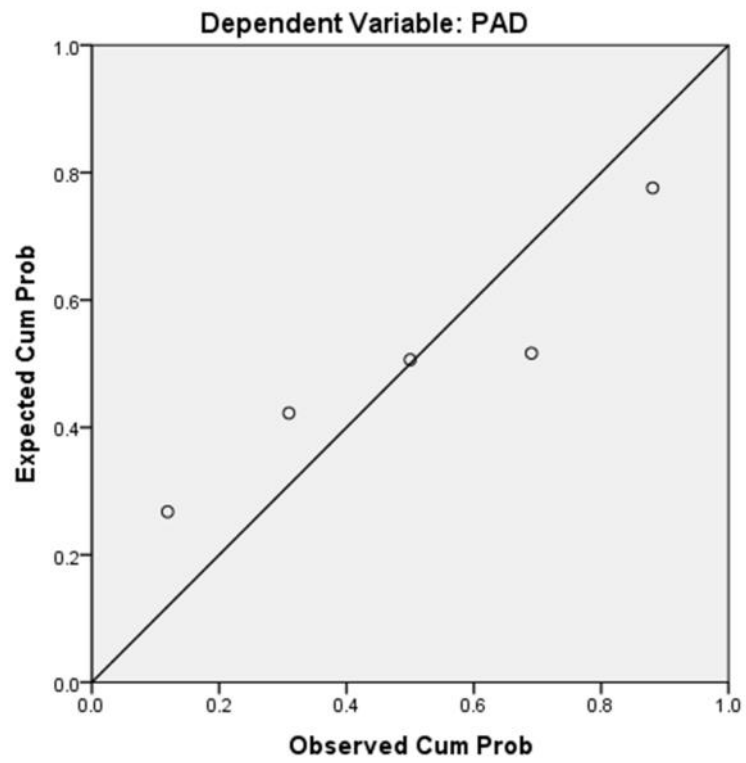
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11.7162	11.9570	11.8251	.09149	5
Std. Predicted Value	-1.190	1.442	.000	1.000	5
Standard Error of Predicted Value	.012	.019	.017	.003	5
Adjusted Predicted Value	10.6417	12.0511	11.5095	.54349	5
Residual	-.01186	.01452	.00000	.00957	5
Std. Residual	-.620	.759	.000	.500	5
Stud. Residual	-1.000	1.000	.200	1.095	5
Deleted Residual	-.09781	1.21712	.31559	.55003	5
Stud. Deleted Residual	0
Mahal. Distance	.898	3.199	2.400	1.059	5
Cook's Distance	.184	1011.067	232.972	439.461	5
Centered Leverage Value	.225	.800	.600	.265	5

a. Dependent Variable: PAD



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



BIOGRAFI PENULIS



Alwati. Lahir Di Pasitallu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 05 Oktober 1995. Dari pasangan Almarhum Sapiing dan Ibu Alo.

Penulis Telah masuk sekolah Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SDI Pasitallu 1 Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tamat tahun 2008. Dan Sekolah Tingkat Menengah Pertama Di SMPN 3 Taka Bonerate Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tamat tahun 2011. Dan Lanjut Sekolah Menengah Di Madrasah Aliyah Negeri Bontoharu Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tamat tahun 2014. Pada tahun yang sama tahun (2014) penulis melanjutkan pendidikan pada Program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai 2018